

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Attamimi, A. Hamid. S., 1993, *Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djarmikan, Sastra dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno 1982, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HD, Stout, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Lailam, Tanto, 2017, *Teori dan Hukum Perundang-Undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Koesnoe, Mohammad, 2010, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-hill, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Natabaya, H.A.S., 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Nugroho, D Rianto, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Poerwadaminta, W.J.S, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, PT. Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Roestandi, Achmad, 2006, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Kanisius, Yogyakarta.

Suganda, Daan, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Sinar Baru, Bandung.

Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Winanrno, Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

### **Makalah dan Jurnal**

Hadjon, Philipus M., “Tentang Wewenang Pemerintah”, *Pro Justitia*, Nomor XVI, Tahun 1998, Universitas Airlangga, Surabaya.

Jati, Wasisto Raharjo, “Analisa Status, Kedudukan, dan Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, Lembaga Administrasi Negara, Samarinda.

Kantaprawira, Rusadi, “Hukum dan Kekuasaan”, *Makalah*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.

Marwi, Akhmad, 2016, “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)”, *Jurnal IUS*, Vol. IV, Nomor 3, Tahun 2016, Universitas Mataram, Mataram.

Syafrudin, Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Tahun 2000, Universitas Parahyangan, Bandung.

Wantu, Fence M., “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 3, Tahun 2007, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **Skripsi**

Frisca Tyara M. Fanhar, *Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Melaksanakan Mutasi Kepegawaian di Kota Bandar Lampung*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Herlambang Adhi Nugroho, *Pelaksanaan Kewenangan Kepala Daerah dalam Penentuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boyolali*, Program Kekhususan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).